



Integrating Finance and Sustainability: A Literature-Based Analysis of Financial Management for Sustainable Policy Implementation

Integrasi Keuangan dan Keberlanjutan: Analisis Literatur Manajemen Keuangan Untuk Implementasi Kebijakan Berkelanjutan

Ihdina Gustina

Program Studi Manajemen, STIE Eka Prasetya

Email Author: hunny.bunny5813@gmail.com

Abstract

*This study aims to examine the role of financial management in supporting the implementation of sustainable policies, to identify financial instruments used for integrating sustainability objectives, and to analyse the key drivers and barriers affecting the effectiveness of financial-sustainability integration. The research employs a systematic literature review approach based on 100 academic articles, focusing on an in-depth analysis of the top ten journals published between 2022 and 2025, including *Journal of Environmental Management*, *Frontiers in Environmental Science*, and *Sustainability*. Data were synthesized thematically to capture insights related to sustainable finance, green investment, and fiscal environmental policies. The findings reveal that financial management plays a strategic role in steering public and corporate policy toward sustainable development through green budgeting, fiscal transparency, and ESG (Environmental, Social, and Governance)-based reporting. Financial instruments such as green bonds, sustainability-linked loans, and blended finance have been proven effective in aligning economic and environmental objectives. However, the success of such policies is influenced by regulatory readiness, institutional capacity, investor confidence, and the degree of digitalization in financial systems. The study concludes that collaboration among governments, financial institutions, and the private sector is a key prerequisite for achieving sustainable financial policy. Strengthening green financial governance and fostering data-driven fiscal innovations are crucial pathways toward enhancing the effectiveness of sustainability-oriented financial management.*

Keywords: ESG, financial management, green finance, sustainable policy, sustainable investment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran manajemen keuangan dalam mendukung implementasi kebijakan berkelanjutan, mengidentifikasi instrumen keuangan yang digunakan dalam integrasi tujuan keberlanjutan, serta menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat efektivitasnya. Pendekatan yang digunakan adalah *systematic literature review* terhadap 100 artikel, dengan fokus analisis mendalam pada sepuluh jurnal teratas yang diterbitkan pada periode 2022–2025, termasuk *Journal of Environmental Management*, *Frontiers in Environmental Science*, dan *Sustainability*. Data dikumpulkan melalui sintesis tematik terhadap artikel akademik yang relevan dengan isu keuangan berkelanjutan, investasi hijau, serta kebijakan fiskal lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen keuangan berperan strategis dalam mengarahkan kebijakan publik dan korporasi menuju pembangunan berkelanjutan melalui optimalisasi penganggaran hijau, transparansi fiskal, serta pelaporan berbasis ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Instrumen keuangan seperti *green bonds*, *sustainability-linked loans*, dan *blended finance* terbukti efektif dalam memperkuat integrasi tujuan ekonomi dan lingkungan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut dipengaruhi oleh faktor regulasi, kapasitas institusional, kepercayaan investor, serta kesiapan digitalisasi sistem keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan kebijakan keuangan berkelanjutan. Penguatan tata kelola keuangan hijau dan inovasi instrumen fiskal berbasis data menjadi arah utama bagi peningkatan efektivitas kebijakan berkelanjutan di masa depan.

Kata Kunci: ESG, investasi berkelanjutan, kebijakan berkelanjutan, keuangan hijau, manajemen keuangan



PENDAHULUAN

Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial telah menjadikan isu keberlanjutan sebagai salah satu tantangan terbesar abad ke-21. Dunia kini menghadapi tekanan untuk bertransisi menuju sistem ekonomi yang lebih hijau dan inklusif, di mana kebijakan publik dan manajemen keuangan memainkan peran penting dalam memastikan arah pembangunan yang berkelanjutan (Hawkins & Weber, 2015; Raman et al., 2025). Di tengah situasi tersebut, manajemen keuangan tidak lagi dipahami semata sebagai instrumen untuk mencapai efisiensi dan profitabilitas ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menyalurkan modal, menilai risiko keberlanjutan, serta mengintegrasikan dimensi sosial dan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan keuangan (Liu & Huang, 2022; Yang et al., 2025).

Secara global, pendekatan keuangan berkelanjutan berkembang sebagai upaya untuk menghubungkan kebijakan pembangunan dengan mekanisme pasar. Konsep ini menekankan pentingnya menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial, dan ekologis melalui inovasi keuangan dan tata kelola yang bertanggung jawab (Folque et al., 2022; Singh et al., 2024). Transformasi ini menuntut adanya integrasi yang lebih kuat antara kebijakan publik dan praktik manajemen keuangan, terutama dalam konteks pembiayaan transisi menuju ekonomi rendah karbon dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) (Raman et al., 2025; Singh et al., 2024).

Negara-negara anggota OECD, misalnya, telah mengembangkan kerangka kebijakan keuangan hijau yang menekankan penguatan pembiayaan publik dan mobilisasi instrumen pasar—termasuk obligasi hijau/berkelanjutan—untuk mempercepat proyek-proyek rendah karbon dan tujuan lingkungan (Habib et al., 2025; OECD, 2023). Pada level subnasional, pembiayaan daerah dan kota juga semakin dipandang penting karena banyak agenda iklim dan layanan publik berkelanjutan dijalankan di tingkat lokal, sehingga membutuhkan dukungan instrumen pendanaan yang sesuai (OECD, 2025).

Di sisi lain, negara berkembang seperti Indonesia berupaya menyesuaikan struktur kebijakan fiskal dan keuangannya dengan prinsip keberlanjutan melalui penerbitan *sovereign green* sukuk serta penyusunan Taksonomi Hijau Indonesia sebagai panduan klasifikasi aktivitas ekonomi hijau bagi sektor keuangan (United Nations Development Programme [UNDP], 2018;



Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2022). Instrumen-instrumen tersebut menunjukkan adanya dorongan kebijakan untuk memperluas alokasi pembiayaan menuju proyek yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sekaligus meningkatkan transparansi arah investasi.

Integrasi antara keuangan dan keberlanjutan bukanlah proses yang sederhana. Di banyak negara, implementasi kebijakan berkelanjutan masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas institusional, kurangnya koordinasi lintas sektor, dan belum optimalnya pelibatan lembaga keuangan dalam perencanaan kebijakan (Raman et al., 2025; Singh et al., 2024). Masalah klasik seperti asimetri informasi, biaya transaksi tinggi, dan risiko kebijakan dapat menurunkan minat investor terhadap proyek berkelanjutan, terutama di negara berkembang (Raman et al., 2025; Hawkins & Weber, 2015). Selain faktor kelembagaan, konteks sosial—termasuk budaya lokal—juga memengaruhi penerimaan program, partisipasi komunitas, dan legitimasi kebijakan, sehingga “satu desain kebijakan” sering tidak efektif untuk semua wilayah (Brennan et al., 2009; Prokopy & Aldrich, 2012; Huraerah et al., 2023). Dalam konteks ini, manajemen keuangan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya berjalan selaras dengan prioritas kebijakan publik dan tujuan keberlanjutan jangka panjang (Liu & Huang, 2022).

Kajian akademik mengenai keuangan berkelanjutan telah berkembang pesat dalam dekade terakhir. Literatur menunjukkan perhatian besar terhadap beragam instrumen seperti *green bonds*, *ESG-linked loans*, dan *blended finance* sebagai sarana mobilisasi modal untuk tujuan keberlanjutan (Raman et al., 2025; Singh et al., 2024). Pada sektor perbankan, isu risiko iklim juga semakin dipahami sebagai faktor yang dapat memengaruhi kualitas portofolio kredit dan stabilitas keuangan, sehingga mendorong kebutuhan integrasi penilaian risiko iklim dalam kebijakan pembiayaan (Alsagr & Apergis, 2025; Liu & Huang, 2022). Di tingkat makro, tekanan fiskal dan arah kebijakan lingkungan juga berkaitan dengan dinamika emisi dan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya memengaruhi ruang fiskal serta strategi pembiayaan transisi (Chen, 2025).

Meski demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang cukup jelas. Pertama, sebagian studi bersifat sektoral, membahas keuangan hijau dari perspektif makroekonomi atau kelembagaan perbankan tanpa mengulas secara memadai bagaimana praktik manajemen keuangan di tingkat organisasi dapat mendukung implementasi kebijakan



berkelanjutan (Singh et al., 2024; Liu & Huang, 2022). Kedua, belum banyak model konseptual yang secara komprehensif menjelaskan bagaimana fungsi manajemen keuangan—seperti perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan—dapat menjadi instrumen operasional dalam pelaksanaan kebijakan publik untuk keberlanjutan (Raman et al., 2025; Chala & Demidov, 2024). Ketiga, bukti empiris masih didominasi konteks negara maju, sedangkan dinamika negara berkembang dengan struktur regulasi dan kapasitas institusional yang berbeda masih relatif kurang dieksplorasi (OECD, 2025; Singh et al., 2024).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang berupaya menyatukan dua bidang yang selama ini sering berjalan terpisah: manajemen keuangan dan kebijakan publik. Studi ini tidak hanya mengulas inovasi instrumen keuangan hijau, tetapi juga menganalisis bagaimana proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan dapat berperan langsung dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan berkelanjutan (Raman et al., 2025; Liu & Huang, 2022). Dengan meninjau literatur global dan regional, penelitian ini menawarkan sintesis konseptual yang menggambarkan hubungan antara praktik keuangan, tata kelola kebijakan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Folque et al., 2022; Singh et al., 2024).

Dari sisi praktis, urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan besarnya kebutuhan investasi tahunan untuk mempercepat transisi energi dan mencapai target *net-zero*, yang diperkirakan berada pada skala triliunan dolar per tahun (*International Energy Agency* [IEA], 2024a, 2024b). Tanpa integrasi yang kuat antara sistem keuangan dan kebijakan publik, kebijakan keberlanjutan berisiko menjadi wacana tanpa dukungan nyata dalam bentuk investasi dan insentif ekonomi yang konsisten (Hawkins & Weber, 2015; OECD, 2023). Di Indonesia, tantangan ini nyata dalam kebijakan transisi energi dan pembangunan rendah karbon yang memerlukan mekanisme pembiayaan yang kredibel, terukur, dan selaras dengan klasifikasi hijau (OJK, 2022; UNDP, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana manajemen keuangan berperan dalam implementasi kebijakan berkelanjutan berdasarkan sintesis literatur internasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi mekanisme dan instrumen keuangan yang digunakan untuk mendukung kebijakan tersebut, serta menelusuri tantangan dan peluang penerapannya, khususnya di konteks negara berkembang



(Raman et al., 2025; Singh et al., 2024). Dengan memadukan temuan lintas disiplin, penelitian ini diharapkan dapat menyusun kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara pengelolaan keuangan, instrumen hijau, dan keberhasilan kebijakan berkelanjutan (Folque et al., 2022; Liu & Huang, 2022).

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan penelitian utama sebagai berikut:

- PP1:** Bagaimana peran manajemen keuangan dalam mendukung implementasi kebijakan berkelanjutan?
- PP2:** Instrumen keuangan apa saja yang digunakan untuk mengintegrasikan tujuan keberlanjutan dalam kebijakan publik dan korporasi?
- PP3:** Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan pendorong efektivitas integrasi keuangan dengan kebijakan berkelanjutan?

KERANGKA TEORETIS DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoretis

Dalam memahami hubungan antara manajemen keuangan dan kebijakan berkelanjutan, diperlukan fondasi teoretis yang mampu menjelaskan bagaimana keputusan keuangan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan sosial dan lingkungan. Beberapa teori utama yang relevan dalam konteks ini meliputi *sustainable finance*, *stakeholder theory*, *institutional theory*, dan *policy integration theory* (Schoenmaker, 2019; Freeman, 1984; DiMaggio & Powell, 1983; Candel & Biesbroek, 2016).

Pertama, *theory of sustainable finance* menegaskan bahwa keputusan keuangan yang mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dapat menciptakan nilai jangka panjang yang sejalan dengan kepentingan publik. Teori ini berangkat dari pandangan bahwa pasar keuangan tidak semata berfungsi untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga menjadi instrumen alokasi sumber daya yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan sosial melalui integrasi pertimbangan ESG dan pengelolaan risiko keberlanjutan (Schoenmaker, 2019). Pendekatan ini menekankan pentingnya menginternalisasi risiko lingkungan dan sosial



ke dalam pengambilan keputusan keuangan, baik di sektor publik maupun swasta (Liu & Huang, 2022; Raman et al., 2025).

Kedua, *stakeholder theory* memberikan landasan etis dan strategis dalam memahami peran manajemen keuangan dalam kebijakan berkelanjutan. Menurut teori ini, organisasi memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap pemegang saham, tetapi juga terhadap berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti masyarakat, pemerintah, dan lingkungan (Freeman, 1984; Donaldson & Preston, 1995). Dengan demikian, keputusan keuangan perlu mencerminkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab sosial, termasuk dampak yang timbul bagi pemangku kepentingan yang lebih luas (Freeman, 1984).

Ketiga, *institutional theory* menjelaskan bagaimana norma, nilai, dan regulasi memengaruhi perilaku organisasi dalam mengadopsi praktik keuangan berkelanjutan. Organisasi sering menyesuaikan struktur formal dan praktik manajerial untuk memperoleh legitimasi sosial dan politik (Meyer & Rowan, 1977). Dalam kerangka isomorfisme institusional, tekanan koersif, mimetik, dan normatif dapat mendorong organisasi menjadi semakin serupa dalam praktiknya—termasuk dalam adopsi standar dan praktik keberlanjutan—sebagai respons atas regulasi, ekspektasi profesi, dan tuntutan lingkungan eksternal (DiMaggio & Powell, 1983).

Keempat, *policy integration theory* menyoroti pentingnya sinergi kebijakan lintas sektor dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Teori ini menegaskan bahwa kebijakan keuangan, fiskal, dan lingkungan tidak dapat berjalan secara terpisah karena keberlanjutan merupakan isu lintas-sektor yang memerlukan koordinasi antar lembaga dan tingkat pemerintahan (Persson, 2004; Candel & Biesbroek, 2016). Dalam tradisi *environmental policy integration*, integrasi dipahami sebagai memasukkan tujuan/pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan sektor non-lingkungan untuk mengurangi *policy incoherence* dan membangun sinergi (Lafferty & Hovden, 2003; Jordan & Lenschow, 2010).

Teori tersebut membentuk kerangka konseptual yang menjelaskan bahwa manajemen keuangan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi normatif dan institusional yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan berkelanjutan (Schoenmaker, 2019; DiMaggio & Powell, 1983; Candel & Biesbroek, 2016).



Kerangka Konseptual

Berdasarkan sintesis teoretis di atas, penelitian ini membangun kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara manajemen keuangan (*financial management*) dan implementasi kebijakan berkelanjutan (*sustainable policy implementation*) melalui tiga dimensi utama: instrumen keuangan, tata kelola dan pelaporan, serta kapasitas kelembagaan (Raman et al., 2025; Singh et al., 2024).

Pertama, dimensi instrumen keuangan mencakup berbagai mekanisme yang digunakan untuk mendanai kebijakan berkelanjutan, seperti *green bonds*, *sustainability/ESG-linked loans*, *carbon pricing*, *sustainable investment funds*, dan *blended finance* (International Capital Market Association, 2025; Loan Syndications and Trading Association, 2025; World Bank, 2024; Folque et al., 2022). Instrumen-instrumen tersebut memungkinkan alokasi dana yang lebih terarah untuk proyek-proyek lingkungan dan sosial, serta meningkatkan transparansi penggunaan dana (International Capital Market Association, 2025). Dalam kerangka ini, manajemen keuangan bertugas merancang strategi pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berorientasi pada hasil keberlanjutan (Raman et al., 2025; Singh et al., 2024).

Kedua, dimensi tata kelola dan pelaporan (*governance and reporting*) menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana berkelanjutan. Keberhasilan kebijakan berkelanjutan sangat bergantung pada kemampuan lembaga menyusun laporan keuangan dan keberlanjutan yang kredibel, termasuk pengungkapan risiko dan peluang keberlanjutan yang relevan bagi pengguna laporan (IFRS Foundation, 2023a, 2023b). Integrasi antara akuntansi keuangan dan pelaporan ESG menjadi instrumen penting untuk mengukur dampak, memperkuat akuntabilitas, dan membangun kepercayaan investor; kerangka seperti TCFD (pilar: *governance*, *strategy*, *risk management*, *metrics & targets*) dan standar GRI juga banyak digunakan untuk memperkuat kualitas pengungkapan (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2017). Pada sektor perbankan, penguatan pelaporan dan manajemen risiko keberlanjutan juga terkait dengan pengelolaan risiko keuangan, termasuk risiko iklim yang berpotensi memengaruhi portofolio pinjaman (Alsagr & Apergis, 2025; Liu & Huang, 2022).

Ketiga, dimensi kapasitas kelembagaan (*institutional capacity*) mencerminkan kemampuan pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam menerapkan prinsip



keuangan berkelanjutan. Kapasitas ini mencakup aspek regulasi, sumber daya manusia, serta infrastruktur pendukung (misalnya sistem informasi dan data keberlanjutan) yang menentukan seberapa efektif integrasi kebijakan dapat dijalankan (Raman et al., 2025; Singh et al., 2024). Dalam perspektif institusional, kelemahan kapasitas dan ketidakpastian aturan dapat menghambat pembentukan praktik yang legitim dan konsisten, sedangkan tekanan regulasi dan norma profesi dapat mendorong adopsi praktik keberlanjutan secara lebih cepat (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977).

Kerangka konseptual ini menggambarkan bahwa manajemen keuangan berfungsi sebagai mekanisme penghubung antara kebijakan publik dan keberlanjutan. Efektivitas implementasi kebijakan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana sistem manajemen keuangan mampu menginternalisasi prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh tahapan siklus keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan (IFRS Foundation, 2023a).

Integrasi keuangan dan keberlanjutan bukan hanya berkaitan dengan inovasi finansial, tetapi juga transformasi paradigmatik dalam cara lembaga mengelola sumber daya. Manajemen keuangan yang berorientasi pada keberlanjutan menciptakan mekanisme alokasi modal yang selaras dengan tujuan sosial-lingkungan, meningkatkan legitimasi kebijakan, serta memperkuat stabilitas ekonomi jangka panjang (Schoenmaker, 2019; Candel & Biesbroek, 2016; Raman et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, menyeleksi, dan mensintesis hasil-hasil penelitian yang membahas hubungan antara manajemen keuangan dan kebijakan berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan konsep, praktik, serta instrumen keuangan yang digunakan dalam mendukung implementasi kebijakan berkelanjutan di berbagai negara dan sektor ekonomi.

Proses pengumpulan literatur dilakukan secara sistematis melalui beberapa basis data akademik utama, yaitu *Publish or Perish* (PoP) dan *Google Scholar*. Kata kunci yang digunakan mencakup kombinasi istilah dalam bahasa Inggris dan Indonesia seperti “*financial*



management,” *“sustainable policies*,” *“green finance*,” *“sustainability finance*,” serta “manajemen keuangan” dan “kebijakan berkelanjutan.” Pencarian difokuskan pada publikasi berbentuk artikel jurnal ilmiah yang terbit dalam kurun waktu 2020 hingga 2025 untuk menjamin relevansi dan kebaruan informasi.

Dari seluruh proses pencarian, terkumpul sebanyak 240 artikel yang berpotensi relevan dengan topik penelitian. Artikel-artikel tersebut kemudian melalui tahap penyaringan (*screening*) menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat. Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel terbit di jurnal akademik bereputasi, (2) memiliki teks lengkap dalam *format PDF*, (3) bersifat *open access*, serta (4) secara substansial membahas integrasi manajemen keuangan dan kebijakan berkelanjutan. Artikel yang tidak memenuhi salah satu dari kriteria tersebut dieliminasi dari analisis.

Setelah melalui proses seleksi, tersisa 100 artikel jurnal yang memenuhi seluruh kriteria dan digunakan dalam analisis akhir. Setiap artikel dibaca secara mendalam untuk mengekstraksi data dan informasi terkait tema-tema kunci, seperti: konsep integrasi keuangan dan keberlanjutan, bentuk instrumen keuangan berkelanjutan (misalnya obligasi hijau, *ESG-linked loans*, atau *blended finance*), mekanisme tata kelola dan pelaporan keuangan berkelanjutan, serta tantangan implementasi kebijakan di berbagai konteks, khususnya di negara berkembang.

Tabel 1. Ringkasan Alur Seleksi Literatur (PRISMA 2020)

Tahap PRISMA	Item	Jumlah (n)
Identifikasi	Rekaman/artikel teridentifikasi dari <i>Publish or Perish</i> (PoP)	150
	Rekaman/artikel teridentifikasi dari <i>Google Scholar</i>	90
	Total rekaman/artikel teridentifikasi	240
	Duplikasi dihapus sebelum penyaringan	40
Penyaringan	Rekaman/artikel dikeluarkan karena alasan lain (mis. bukan artikel jurnal, di luar tahun, dll.)	0
	Rekaman/artikel disaring (judul/abstrak)	200
	Rekaman/artikel dikeluarkan (judul/abstrak tidak sesuai fokus/topik)	90
Kelayakan	Artikel full-text yang dicari untuk ditelaah	110
	Artikel <i>full-text</i> tidak ditemukan/tidak dapat diakses	0
	Artikel <i>full-text</i> yang dinilai kelayakannya	110
	Artikel <i>full-text</i> yang dikeluarkan (alasan: tidak sesuai topik)	10
Dimasukkan	Artikel yang dimasukkan dalam tinjauan akhir	100

Sumber:peneliti (2025)



Tahap analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis tematik. Artikel yang telah terpilih dikelompokkan ke dalam tiga klaster utama: (1) instrumen dan inovasi keuangan berkelanjutan, (2) tata kelola keuangan dan pelaporan keberlanjutan, serta (3) dukungan kebijakan dan regulasi publik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola hubungan dan peran strategis manajemen keuangan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya menekankan pengumpulan literatur secara luas dari berbagai sumber, tetapi juga menitikberatkan pada kedalaman analisis konseptual untuk menjelaskan bagaimana manajemen keuangan berfungsi sebagai penggerak, penghubung, sekaligus pengendali dalam implementasi kebijakan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap 100 artikel yang lolos tahap seleksi dan eksklusi menunjukkan bahwa kajian mengenai manajemen keuangan dalam kebijakan berkelanjutan berkembang dalam beberapa arah tematik utama. Setiap tema merepresentasikan fokus dan pendekatan yang berbeda dalam menjawab tiga pertanyaan penelitian (RQ) yang telah dirumuskan sebelumnya.

Pemetaan ini tidak hanya menggambarkan kecenderungan literatur, tetapi juga menyoroti bagaimana aspek manajemen keuangan, instrumen pembiayaan, serta faktor kelembagaan saling berkaitan dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hasil sintesis literatur, lima kategori tematik utama berhasil diidentifikasi, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.



Tabel 2. Pemetaan Tematik Penelitian

Kategori Tematik	Jumlah Artikel	Cakupan Topik	Temuan Utama	Relevansi RQ
Integrasi Manajemen Keuangan dan Kebijakan Publik	26	Penganggaran hijau, fiskal desentralisasi, keuangan publik berkelanjutan, peran pemerintah daerah dalam pembiayaan hijau.	Pemerintah menggunakan prinsip manajemen keuangan untuk merancang instrumen fiskal ramah lingkungan; pendekatan berbasis hasil dan akuntabilitas mendorong kebijakan hijau.	RQ1
Instrumen Keuangan Hijau (<i>Green Finance Instruments</i>)	32	<i>Green bond</i> , <i>ESG-linked loans</i> , <i>carbon pricing</i> , <i>blended finance</i> , dan sukuk hijau.	<i>Green finance</i> terbukti meningkatkan pembiayaan proyek berkelanjutan dan menurunkan emisi, meskipun efektivitasnya tergantung kesiapan pasar dan regulasi.	RQ2
Akuntansi Keberlanjutan dan Pelaporan ESG	18	Pelaporan ESG, akuntansi karbon, <i>disclosure</i> keberlanjutan, dan kinerja keuangan hijau.	Integrasi pelaporan ESG dalam sistem keuangan meningkatkan transparansi dan membantu <i>investor</i> serta <i>regulator</i> mengevaluasi dampak kebijakan berkelanjutan.	RQ1, RQ3
Teknologi dan Inovasi Keuangan (<i>Green Fintech</i>)	9	<i>Fintech</i> hijau, big data ESG, digital <i>finance</i> , AI untuk pemantauan dampak lingkungan.	Inovasi teknologi memperluas akses pembiayaan hijau, khususnya bagi UMKM dan proyek kecil, namun menghadapi kendala regulasi dan data.	RQ2, RQ3
Faktor Pendorong dan Hambatan Implementasi	15	Regulasi, risiko politik, biaya transaksi, kapasitas institusional, kepercayaan <i>investor</i> .	Faktor pendorong utama: kebijakan pajak hijau, transparansi, dukungan publik-swasta; hambatan utama: asimetri informasi, ketidakpastian regulasi, dan risiko pasar.	

Sumber: dirangkum penulis (2025)

Dari total 100 artikel yang dianalisis, terlihat bahwa penelitian mengenai manajemen keuangan untuk kebijakan berkelanjutan menunjukkan kecenderungan yang cukup beragam namun dengan pola dominan tertentu. Tema Instrumen Keuangan Hijau (*Green Finance Instruments*) menempati porsi terbesar dengan 32% dari total publikasi. Hal ini menunjukkan bahwa topik pembiayaan hijau, seperti *green bond*, *ESG-linked loans*, dan *carbon pricing*, menjadi fokus utama dalam literatur karena perannya yang strategis dalam mendukung pendanaan kebijakan berkelanjutan.

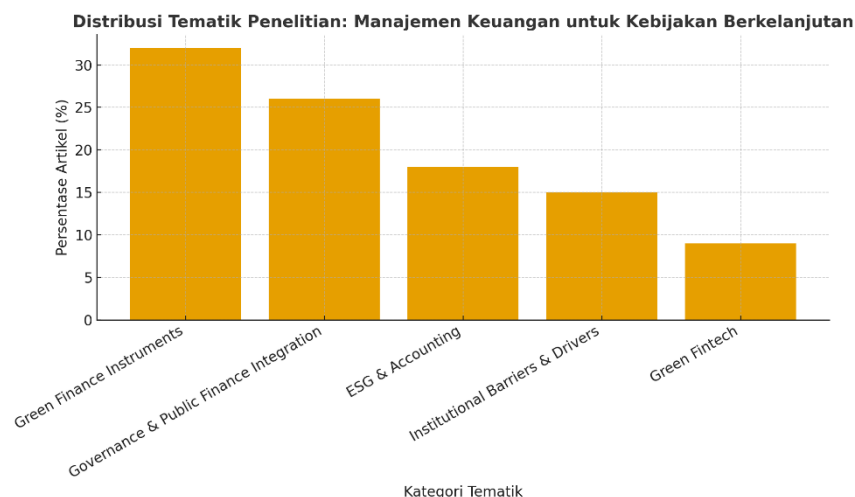
Selanjutnya, Integrasi Manajemen Keuangan dan Kebijakan Publik mencakup 26% dari total artikel, menggambarkan perhatian akademik terhadap bagaimana prinsip-prinsip

manajemen keuangan diterapkan dalam sistem fiskal dan tata kelola publik yang berorientasi pada keberlanjutan.

Kategori Akuntansi Keberlanjutan dan Pelaporan ESG menempati posisi ketiga dengan 18%, menunjukkan semakin kuatnya peran akuntansi dalam mengukur dan melaporkan dampak lingkungan dan sosial dari kebijakan keuangan.

Sementara itu, Faktor Pendorong dan Hambatan Implementasi mencakup 15% dari literatur yang ditinjau, menggarisbawahi pentingnya konteks kelembagaan, regulasi, dan risiko politik dalam efektivitas kebijakan keuangan berkelanjutan.

Adapun *Green Fintech* hanya mewakili 9% dari total artikel, namun menunjukkan bidang yang sedang tumbuh cepat dengan potensi besar dalam menghubungkan teknologi digital dengan pembiayaan berkelanjutan, terutama untuk sektor UMKM dan proyek lingkungan berskala kecil.



Gambar 1. Distribusi Tematik Penelitian: Manajemen Keuangan untuk Kebijakan Berkelanjutan

Sebanyak sepuluh artikel jurnal dengan relevansi tertinggi diidentifikasi sebagai representasi utama perkembangan penelitian mengenai *financial management for sustainable policies*. Kesepuluh artikel ini berasal dari jurnal internasional bereputasi dan mencerminkan fokus interdisipliner antara keuangan, lingkungan, dan tata kelola publik. Mayoritas publikasi berasal dari periode 2022–2025, menandakan bahwa isu integrasi manajemen keuangan dengan kebijakan berkelanjutan merupakan area riset yang relatif baru namun mengalami perkembangan pesat.



Tabel 3. Artikel Jurnal Dengan Relevansi Tertinggi

No	Judul Artikel	Penulis	Tahun	Jurnal
1	<i>Fiscal Pressure, Carbon Emissions and Economic Growth: Evidence from China</i>	Chen	2025	<i>Journal of Environmental Management</i>
2	<i>Innovations and Barriers in Sustainable and Green Finance for Advancing Sustainable Development Goals</i>	Raghu Raman, Suparna Ray, Dayana Das, Prema Nedungadi	2025	<i>Frontiers in Environmental Science</i>
3	<i>Sustainable Financing Practices and Financial Institutions' Performance: A Systematic Literature Review</i>	Amit Kumar Singh, Rohit Kumar Shrivastav, Ramkrishna Chapagain	2024	<i>Ramanujan International Journal of Business and Research</i>
4	<i>Contribution of Sustainable Investment to Sustainable Development within the Framework of the SDGs: The Role of the Asset Management Industry</i>	Maria Assunção Folque, Elena Escrig-Olmedo, María Teresa Corzo Santamaría	2022	<i>Sustainability Accounting, Management and Policy Journal</i>
5	<i>Total Climate Change Risk and Banks' Loan Portfolios: Fresh Evidence and Extensions</i>	Alsagr, Apergis	2025	<i>Journal of Environmental Management</i>
6	<i>Sustainable Financing and Financial Risk Management of Financial Institutions—Case Study on Chinese Banks</i>	Hao-Chen Liu, Weilun Huang	2022	<i>Sustainability</i>
7	<i>Financing Sustainability: Applying the BIOFIN Framework to Government Investments in Conserving Native and Indigenous Livestock Breeds in Central India</i>	Lad, Khudsar, Sharma, Singh	2025	<i>PLOS ONE</i>
8	<i>Theoretical Aspects of Green Financing for Providing Sustainable Development</i>	Вероника Чала, Bogdan Demidov	2024	<i>Economic Scope</i>
9	<i>Green Finance and Environmental Decentralization Drive OECD Low Carbon Transitions</i>	Habib, Abd Rahman, Hashmi, Ali	2025	<i>Scientific Reports</i>
10	<i>Unraveling the Economic and Environmental Impacts of Emerging Financial Risks: A Strategic Perspective</i>	Yang, Sultan, Ibrahim, Xakimov, Zhang	2025	<i>Ecotoxicology and Environmental Safety</i>

Sumber: peneliti (2025)

Hasil sintesis menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian menyoroti pentingnya inovasi dalam instrumen keuangan hijau dan pelaporan keberlanjutan sebagai sarana utama untuk mengarahkan kebijakan pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Beberapa studi, seperti yang dipublikasikan dalam *Journal of Environmental Management* dan *Frontiers in Environmental Science*, menekankan peran pembiayaan hijau, risiko iklim, serta strategi mitigasi karbon dalam konteks kebijakan fiskal dan keuangan publik. Sementara itu, artikel dari



Sustainability dan *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal* memperlihatkan pendekatan yang lebih akuntansial, dengan menyoroti transparansi pelaporan ESG dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas institusional.

Selain itu, temuan dari *PLOS ONE* dan *Scientific Reports* memperluas perspektif menuju konteks regional dan sektoral, seperti penerapan pembiayaan berkelanjutan dalam proyek konservasi dan desentralisasi lingkungan di negara OECD. Tren ini memperlihatkan bahwa arah penelitian terkini semakin berorientasi pada penerapan lintas sektor, yang tidak hanya menyoroti instrumen keuangan tetapi juga faktor tata kelola, inovasi teknologi, dan dimensi sosial dari kebijakan keberlanjutan. Dengan demikian, kumpulan artikel ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana manajemen keuangan menjadi instrumen strategis dalam pembentukan kebijakan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global.

Pembahasan Penelitian

RQ1: Peran Manajemen Keuangan dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Berkelanjutan

Manajemen keuangan memainkan peran sentral dalam mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan melalui perencanaan fiskal, investasi publik, dan kebijakan penganggaran hijau. Dalam konteks kebijakan publik, penelitian Chen (2025) menyoroti bagaimana tekanan fiskal (*fiscal pressure*) memengaruhi kemampuan pemerintah daerah di Tiongkok untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan emisi karbon. Melalui model PVAR yang menganalisis 30 provinsi dari tahun 2008–2021, ditemukan bahwa tekanan fiskal jangka pendek memang menurunkan emisi karbon melalui pembatasan industri intensif karbon, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, biaya tata kelola lingkungan memperburuk ketidakseimbangan fiskal, menunjukkan perlunya integrasi kebijakan fiskal dan lingkungan secara sistematis.

Temuan ini sejalan dengan Hawkins dan Weber (2015) yang menegaskan bahwa kebijakan fiskal berkelanjutan harus menginternalisasi risiko iklim dalam keputusan investasi publik dan keuangan negara. Mereka menyoroti pentingnya “*integrated financial governance*” di mana kebijakan fiskal tidak hanya berfokus pada stabilitas makro, tetapi juga pada keberlanjutan ekologis melalui instrumen seperti pajak karbon dan penganggaran berbasis



hasil. Pendekatan ini terbukti efektif di Afrika Selatan melalui implementasi *King III Code* yang mewajibkan perusahaan untuk melaporkan kinerja ESG dalam laporan terintegrasi.

Dalam konteks lembaga keuangan, Singh et al. (2024) melalui tinjauan sistematis menunjukkan bahwa lembaga keuangan yang menerapkan prinsip *sustainable financing* cenderung memiliki kinerja keuangan jangka panjang yang lebih stabil dan reputasi pasar yang lebih baik. Mereka menegaskan bahwa pengelolaan risiko berbasis keberlanjutan menjadi bentuk baru dari *financial stewardship*, yang memperkuat akuntabilitas korporasi terhadap dampak sosial dan lingkungan.

Selain itu, Liu dan Huang (2022) menemukan bahwa bank-bank di Tiongkok yang mengadopsi prinsip *green financial risk management* berhasil menurunkan risiko kredit jangka panjang melalui pembiayaan yang lebih selektif terhadap proyek-proyek ramah lingkungan. Dalam studi kasus pada lima bank besar, implementasi *green credit guidelines* meningkatkan efisiensi alokasi modal dan mengurangi eksposur terhadap aset bermasalah, menunjukkan hubungan langsung antara tata kelola risiko dan kebijakan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, RQ1 menegaskan bahwa manajemen keuangan berperan bukan hanya sebagai penyedia dana, tetapi sebagai *policy enabler* dalam mewujudkan kebijakan berkelanjutan. Integrasi antara tata kelola fiskal, transparansi ESG, dan pengelolaan risiko keuangan merupakan pilar utama dalam memastikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

RQ2: Instrumen Keuangan untuk Integrasi Tujuan Keberlanjutan

Integrasi tujuan keberlanjutan dalam kebijakan publik dan korporasi membutuhkan instrumen keuangan yang inovatif dan adaptif. Berdasarkan hasil tinjauan dari Raman et al. (2025), instrumen utama yang mendukung pembiayaan berkelanjutan meliputi *green bonds*, *ESG-linked loans*, *carbon credits*, dan *blended finance*. Mereka menemukan bahwa keberhasilan instrumen ini sangat bergantung pada kesiapan pasar dan dukungan kebijakan. Sebagai contoh, *green bond frameworks* efektif di negara maju karena adanya standar pelaporan yang ketat dan kepercayaan *investor*, sedangkan di negara berkembang sering kali terhambat oleh asimetri informasi dan ketidakpastian regulasi.

Lebih jauh, Habib et al. (2025) menunjukkan bahwa desentralisasi lingkungan di negara-negara OECD mempercepat transisi rendah karbon melalui kombinasi antara *green finance* dan kebijakan fiskal daerah. Penelitian mereka menegaskan bahwa keterlibatan



pemerintah lokal dalam penerbitan obligasi hijau meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik dan memperluas partisipasi masyarakat dalam proyek ramah lingkungan.

Di tingkat korporasi, Folque et al. (2022) dalam *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal* menegaskan bahwa sektor manajemen aset berperan penting dalam menyalurkan investasi berkelanjutan ke proyek-proyek yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Mereka menyoroti bahwa instrumen seperti *ESG funds* dan *impact investing* tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga meningkatkan legitimasi sosial dan kepercayaan investor.

Kontribusi lain datang dari Lad et al. (2025) yang mengadaptasi kerangka *BIOFIN* (*Biodiversity Finance Initiative*) dalam pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati di India. Studi mereka di *PLOS ONE* menunjukkan bagaimana pendekatan pembiayaan campuran (*blended finance*) dapat memperkuat investasi publik dalam sektor konservasi, khususnya untuk komunitas lokal dan peternak tradisional. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pembiayaan, tetapi juga memastikan keadilan sosial dan inklusi dalam implementasi kebijakan berkelanjutan.

Secara konseptual, Chala dan Demidov (2024) menekankan pentingnya *green financial architecture* dalam menciptakan stabilitas makroekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Mereka menyoroti peran penting bank sentral dan otoritas moneter dalam mengintegrasikan kriteria hijau ke dalam kebijakan makroprudensial dan kebijakan suku bunga. Hal ini selaras dengan gagasan Hawkins dan Weber (2015) bahwa kebijakan keuangan yang berkelanjutan harus mengadopsi *risk narratives* untuk menghubungkan stabilitas sistem keuangan dengan risiko perubahan iklim.

Dengan demikian, RQ2 menegaskan bahwa keberhasilan integrasi keberlanjutan sangat bergantung pada ketersediaan instrumen keuangan yang inovatif, didukung oleh kerangka regulasi yang transparan, dan kesiapan institusional untuk mengelola risiko jangka panjang.



RQ3: Faktor Pendorong dan Penghambat Efektivitas Integrasi Keuangan dan Kebijakan Berkelanjutan

Faktor pendorong utama efektivitas integrasi keuangan dengan kebijakan berkelanjutan meliputi dukungan kebijakan fiskal, stabilitas makro, kepercayaan investor, serta kemajuan teknologi finansial (*fintech*). Sebaliknya, hambatan utama muncul dari ketidakpastian regulasi, asimetri informasi, biaya transaksi tinggi, dan kapasitas institusional yang terbatas.

Menurut Yang et al. (2025), risiko keuangan yang muncul akibat ketidakpastian iklim menciptakan tekanan baru bagi pasar modal global. Studi mereka dalam *Ecotoxicology and Environmental Safety* menemukan bahwa fluktuasi risiko iklim dapat memperbesar volatilitas pasar dan memperlemah efektivitas kebijakan fiskal hijau. Mereka menyarankan integrasi kebijakan *climate risk disclosure* dalam sistem pelaporan keuangan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas investor.

Alsagr dan Apergis (2025) menambahkan bahwa portofolio pinjaman bank yang terpapar risiko iklim cenderung menunjukkan performa yang lebih buruk dalam jangka panjang. Dengan mengamati data bank di Eropa, mereka membuktikan bahwa *climate change risk* perlu dimasukkan dalam kerangka manajemen risiko kredit bank agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Hasil ini memperkuat argumen bahwa instrumen keuangan hijau tidak hanya alat pembiayaan, tetapi juga alat mitigasi risiko sistemik.

Raman et al. (2025) juga mengidentifikasi hambatan implementasi utama, seperti ketidakseragaman definisi "*green finance*" di antara negara, kurangnya insentif pajak, dan rendahnya literasi keuangan lingkungan. Di sisi lain, teknologi seperti *Green Fintech* berperan sebagai katalis dengan menurunkan biaya transaksi dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM hijau.

Dalam konteks negara berkembang, Hawkins dan Weber (2015) menyoroti bahwa penghambat terbesar adalah ketidaksiapan kapasitas institusional dan prioritas pembangunan yang sering kali masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Mereka menekankan perlunya sinergi antara kebijakan fiskal nasional dan sistem keuangan lokal agar pembiayaan berkelanjutan benar-benar berdampak pada masyarakat akar rumput.



Secara keseluruhan, RQ3 menegaskan bahwa efektivitas integrasi keuangan berkelanjutan ditentukan oleh kemampuan institusi untuk menyeimbangkan antara insentif ekonomi dan tujuan lingkungan. Regulasi yang adaptif, transparansi informasi, serta inovasi teknologi menjadi faktor kunci dalam mengatasi hambatan struktural dan meningkatkan daya dorong transformasi hijau.

Dari ketiga RQ di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi antara manajemen keuangan dan kebijakan keberlanjutan merupakan fondasi penting bagi transformasi ekonomi hijau. Kebijakan fiskal yang adaptif, instrumen keuangan yang inovatif, serta tata kelola yang transparan memperkuat mekanisme implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan institusional, harmonisasi regulasi, dan peningkatan literasi keuangan lingkungan di semua level pemerintahan dan sektor korporasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa manajemen keuangan memiliki peran fundamental dalam mengarahkan dan memperkuat implementasi kebijakan berkelanjutan di tingkat publik maupun korporasi. Berdasarkan hasil sintesis terhadap 100 artikel dan analisis mendalam terhadap 10 publikasi jurnal utama, ditemukan bahwa integrasi antara instrumen keuangan, kebijakan fiskal, dan tata kelola lingkungan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan ekologis.

Pertama, dari perspektif kebijakan publik (RQ1), manajemen keuangan terbukti tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan dana, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan strategis yang memengaruhi arah pembangunan berkelanjutan. Penerapan penganggaran hijau, reformasi fiskal, dan pelaporan ESG berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi alokasi sumber daya.

Kedua, dari sisi instrumen (RQ2), kehadiran *green bonds*, *ESG-linked loans*, dan *blended finance* memperkuat hubungan antara sektor keuangan dan kebijakan lingkungan. Instrumen-instrumen ini tidak hanya menyalurkan modal, tetapi juga membentuk mekanisme insentif yang mendorong perilaku berkelanjutan di sektor swasta dan publik.



Ketiga, dari dimensi faktor pendorong dan penghambat (RQ3), ditemukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan keuangan berkelanjutan sangat ditentukan oleh kesiapan regulasi, stabilitas fiskal, kapasitas institusional, dan kepercayaan investor. Dukungan teknologi finansial seperti *green fintech* juga menjadi akselerator penting, meskipun masih menghadapi kendala dalam harmonisasi kebijakan lintas negara. Hasil studi ini memperkuat pandangan bahwa keberlanjutan ekonomi dan lingkungan bukanlah dua tujuan yang bertentangan, melainkan dua dimensi yang dapat saling memperkuat melalui kebijakan keuangan yang terintegrasi dan berbasis bukti.

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan empiris terhadap pemahaman hubungan antara manajemen keuangan dan kebijakan berkelanjutan, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui.

Pertama, keterbatasan utama terletak pada cakupan *literature* yang sebagian besar bersumber dari jurnal berbahasa Inggris dan berfokus pada konteks negara maju. Hal ini dapat menyebabkan bias geografis dalam penarikan kesimpulan, karena tantangan dan struktur kebijakan di negara berkembang, termasuk Indonesia, mungkin berbeda secara signifikan.

Kedua, pendekatan sistematis yang digunakan bersifat deskriptif dan kualitatif, sehingga tidak memberikan pengukuran kuantitatif mengenai kekuatan hubungan antarvariabel seperti efektivitas fiskal hijau, dampak risiko keuangan terhadap emisi karbon, atau tingkat pengembalian investasi hijau.

Ketiga, penelitian ini tidak mencakup analisis longitudinal terhadap perubahan kebijakan dan instrumen keuangan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Padahal, dinamika kebijakan keuangan dan inovasi instrumen hijau sangat cepat berubah, terutama dengan munculnya teknologi digital seperti *blockchain finance* dan *AI-based ESG reporting*. Keterbatasan-keterbatasan ini tidak mengurangi validitas temuan, tetapi memberikan ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan terukur.

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan baik untuk peneliti selanjutnya maupun untuk pembuat kebijakan dan praktisi keuangan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas studi dengan memasukkan data empiris lintas negara, khususnya dari kawasan Asia dan Afrika, agar dapat menggambarkan variasi institusional dan kebijakan yang lebih beragam. Pendekatan



kuantitatif seperti *meta-analysis* atau *econometric modeling* juga dapat digunakan untuk mengukur secara lebih akurat pengaruh instrumen keuangan hijau terhadap indikator pembangunan berkelanjutan.

Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, diperlukan perancangan kebijakan fiskal yang lebih terintegrasi dengan tujuan keberlanjutan, seperti pemberian insentif pajak bagi proyek ramah lingkungan, penerapan *green budgeting framework*, dan pelaporan ESG wajib untuk lembaga publik dan swasta.

Sementara bagi lembaga keuangan dan sektor korporasi, penting untuk memperkuat mekanisme *sustainability governance* dengan mengintegrasikan analisis risiko iklim ke dalam kerangka manajemen risiko keuangan. Selain itu, kolaborasi dengan sektor teknologi digital perlu diperluas untuk mengembangkan sistem keuangan hijau berbasis data yang transparan dan inklusif. Keberhasilan integrasi keuangan dan kebijakan berkelanjutan pada akhirnya menuntut sinergi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui tata kelola keuangan yang inovatif, partisipatif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alsagr, N., & Apergis, N. (2025). *Total Climate Change Risk And Banks' Loan Portfolios: Fresh Evidence And Extensions*. *Journal Of Environmental Management*, 394(127336). <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.127336>
- Brennan, M. A., Flint, C. G., & Luloff, A. E. (2009). *Bringing Together Local Culture And Rural Development: Findings From Ireland, Pennsylvania And Alaska*. *Sociologia Ruralis*, 49(1), 97–112. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9523.2008.00471.x>
- Chala, V., & Demidov, B. (2024). *Theoretical Aspects Of Green Financing For Providing Sustainable Development*. *Economic Scope*, 12(3), 77–90.
- Chen, S. (2025). *Fiscal Pressure, Carbon Emissions And Economic Growth: Evidence From China*. *Journal Of Environmental Management*, 394(127331). <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.127331>
- Delisle, S. D. (2004). *A Layered Homeland: History, Culture And Visions Of Development*. <http://www.lynngehl.com/uploads/5/0/0/4/5004954/27.pdf>
- Effendi, Y. R., & Sahertian, P. (2022). Kontruksi Peran Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Berbasis Budaya Lonto Leok Dalam Penguatan Karakter Siswa. *Jamp: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 5(3), 214–226. <https://journal-fip.um.ac.id/index.php/jamp/article/view/1561>
- Flint, C. G., & Brennan, M. A. (2005). *Local Culture And Rural Development: Findings From Ireland, Pennsylvania, And Alaska*. Utah State University. https://digitalcommons.usu.edu/sswa_facpubs/565



- Folque, M. A., Escrig-Olmedo, E., & Corzo Santamaría, M. T. (2022). *Contribution Of Sustainable Investment To Sustainable Development Within The Framework Of The Sdgs: The Role Of The Asset Management Industry*. *Sustainability Accounting, Management And Policy Journal*, 13(5), 987–1005. <https://ideas.repec.org/a/eme/sampjp/sampj-01-2022-0044.html>
- Habib, M., Abd Rahman, N., Hashmi, R., & Ali, S. (2025). *Green Finance And Environmental Decentralization Drive Oecd Low Carbon Transitions*. *Scientific Reports*, 15(4), 2332. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-11967-y>
- Handaru, B. I. W. (2025). Model Pelatihan Berbasis Kompetensi Untuk Meningkatkan Kepemimpinan Transformasional Komunitas Lokal. *Servatio*, 1(1), 51–58. <https://ojs.sttbk.ac.id/index.php/servatio/article/view/54>
- Hawkins, P., & Weber, O. (2015). *Global Sustainability, Climate Change And Finance Policy: A South African Perspective*. C. Hurst And Company / Jstor Policy Brief No. 65. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://m.lgp4climate.com/uploads%252FMLGP%2520Library%252FUseful%2520Documents%252FEnglish%252FL494%2520eng.pdf&ved=2ahUKEwje7a_Zpu6RAxWNYqACHbtgJk4QFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw2Ya1eCj7JQoZ83yaeJiPvv
- Hudiyanto, R., & Hadi, N. (2019). *Avoiding Local Culture Deprivation In Historical Landscape By Involving Special Interest Community In Foothill Villages Of East Java*. <https://doi.org/10.2991/icskse-18.2019.22>
- Huraerah, A., Nurwulan, R. L., & Voo, P. (2023). Local Culture-Based Community Development In Subang Regency, West Java. *Empati*, 12(1), 25–32. <https://doi.org/10.15408/Empati.V12i1.31786>
- Jannah, F. M., Ridwan, M., Sari, N. A., Sholihah, M., & Rohman, N. (2025). *Peran Manajemen Sekolah Dalam Mengembangkan Pendidikan Berbasis Budaya Lokal Studi Sekolah Dasar Negeri 01 Karanggondang*. *Jurnal Cakrawala Pendidikan Indonesia*, 2(3), 112–121. <https://doi.org/10.61132/Jucapenbi.V2i3.605>
- Jeliastiva, J. (2022). Analysis Of Local Culture Actualization On Village Fund Management. *Journal Of Social Commerce*, 2(3), 127–134. <https://doi.org/10.56209/Jommerce.V2i3.36>
- Lad, M., Khudsar, F., Sharma, V., & Singh, R. (2025). *Financing Sustainability: Applying The Biofin Framework To Government Investments In Conserving Native And Indigenous Livestock Breeds In Central India*. *Plos One*, 20(4), E0330728.
- Liu, H., & Huang, W. (2022). *Sustainable Financing And Financial Risk Management Of Financial Institutions: Case Study On Chinese Banks*. *Sustainability*, 14(9786). <https://doi.org/10.3390/Su1409786>
- Prokopy, L. S., & Aldrich, D. P. (2012). Context Matters: The Importance Of Local Culture In Community Participation. *The Journal Of Extension*, 50(2), 58. <https://tigerprints.clemson.edu/cgi/viewcontent.cgi?Article=2878&Context=Joe>
- Raman, R., Ray, S., Das, D., & Nedungadi, P. (2025). *Innovations And Barriers In Sustainable And Green Finance For Advancing Sustainable Development Goals*. *Frontiers In Environmental Science*, 12(1513204). <https://doi.org/10.3389/Fenvs.2024.1513204>
- Randi, K., & Dagani, G. (2024). Peran Budaya Lokal Terhadap Pencegahan Illegal Fishing. *Journal Publicuho*, 7(4), 1842–1854. <https://doi.org/10.35817/Publicuho.V7i4.536>



- Singh, A. K., Shrivastav, R. K., & Chapagain, R. (2024). *Sustainable Financing Practices And Financial Institutions' Performance: A Systematic Literature Review*. *Ramanujan International Journal Of Business And Research*, 9(2), 45–63. <https://rijbr.in/1/article/view/1528>
- Yang, Y., Sultan, M., Ibrahim, M., Xakimov, A., & Zhang, H. (2025). *Unraveling The Economic And Environmental Impacts Of Emerging Financial Risks: A Strategic Perspective*. *Ecotoxicology And Environmental Safety*, 287, 40845635. DOI: [10.1016/j.ecoenv.2025.118786](https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2025.118786)